

SIGNIFIKANSI KAJIAN BUDAYA BAGI PENGEMBANGAN ILMU-ILMU HUMANIORA¹

Oleh: St. Sunardi

Universitas Sanata Dharma
Jl. Afandi Mrican Tromol Pos 29 Yogyakarta 55002
e-mail: sunardi@yahoo.com

Abstract

Cultural studies in the development of humanities studies is now in a problematic position, if not the opposite. While cultural studies pivot on the practice of meaning in the context of change, humanities sciences nowadays dwell on the mastery of knowledge and skills. It tends to forget its original purpose as studies that aim to humanize humans. To resolve this problem so that both have creative power, the humanities studies must have the courage to present the studies in three-channel mode, namely political, textual and post-disciplinary. Meanwhile, to preserve its anticipatory power, cultural studies must no longer shy to enter the territory of aesthetics and ethics in its studies.

Kajian Budaya dalam pengembangan Ilmu-ilmu Humaniora sekarang berada dalam posisi problematis, kalau bukan berseberangan. Sementara Kajian Budaya berporos pada praktik pemaknaan dalam konteks perubahan, Ilmu-ilmu Humaniora dalam perkembangan sekarang berkuat pada penguasaan pengetahuan dan ketrampilan, lupa akan tujuan awalnya sebagai ilmu yang bertujuan untuk memanusiawikan manusia. Untuk menyelesaikan problem ini agar keduanya memiliki daya kreatif, maka Ilmu-ilmu Humaniora harus berani menghadirkan dalam kajiannya tiga saluran corak, yaitu politis, tekstual dan paska-disipliner, sementara itu, Kajian Budaya tidak bisa lagi malu-malu memasuki wilayah

¹ Tulisan ini pernah disampaikan dalam Munas II dan Seminar Nasional Dosen-Dosen Ilmu-Ilmu Adab (ADIA) se-Indonesia, 15 Oktober 2011, di Hotel Brongto, Yogyakarta.

estetika dan etika dalam kajiannya agar Kajian Budaya tidak kehilangan daya antisipatif.

Kata kunci: perubahan; kajian budaya; ilmu-ilmu humaniora; daya kreatif dan antisipatif.

A. PENDAHULUAN

Tema diskusi ini merupakan salah satu keprihatinan lama saya. Kajian budaya ingin saya jalankan bukan hanya sebagai ilmu atau kajian terapan, tetapi juga saya harapkan bisa dipakai sebagai pintu masuk untuk melakukan refleksi mendalam atas situasi ilmu-ilmu sosial-kemanusiaan di Indonesia. Dalam kaitannya dengan perkembangan awal Kajian Budaya saya pernah menulis "Pada Mulanya Adalah Perlawanan ..." (2003)² Salah satu hasil (berupa keyakinan!) saya yang dapat saya pelajari dari kajian budaya saya tuangkan dalam artikel "Ilmu Sosial Berbasis Sastra" (2002).³ Di samping itu, saya banyak terlibat dalam diskusi kecil yang secara langsung terkait dengan masalah kajian budaya dan ilmu-ilmu humaniora seperti tampak dalam sejumlah kertas kerja berikut ini: "Semiotika dalam Kajian Budaya", "Kajian Budaya + Kajian Islam = Kajian Anti-Islam?", dan "Memperbaharui Identitas Universitas lewat Humaniora Baru" (2009).⁴

B. PEMBAHASAN

Tulisan yang terkait dengan signifikansi kajian budaya ini lebih bernada reflektif dan antisipatif. **Reflektif** dalam artian tulisan ini banyak menimbang-nimbang pengalaman dan pengamatan saya akan peran Kajian Budaya dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu-ilmu humaniora; **antisipatif** dalam artian,

² Dimuat dalam Jurnal *Retorik*, Oktober 2003, 5-42.

³ Dimuat dalam *Majalah Basis*, November-Desember 2002, 8-15.

⁴ Tulisan-tulisan ini tidak dipublikasikan. Tulisan pertama, saya diskusikan dengan sejumlah mahasiswa di Universitas Sanata Dharma, tulisan kedua dengan teman-teman di LKIS, Yogyakarta, dan tulisan ketiga dengan para dosen di Universitas Sanata Dharma.

tulisan ini mengajak kita semua (paling tidak diri saya sendiri) untuk mengantisipasi masyarakat (akademis) kita yang kini dipaksa bunuh diri akademis besar-besaran lewat managerialisme atau *audit culture* yang menimpa perguruan tinggi kita sekarang. Tulisan semacam ini tidak mengharuskan saya memasuki masalah-masalah informatif yang tidak perlu di sekitar Kajian Budaya.

1. Tugas Kajian Budaya yang sudah ditunaikan dengan gemilang adalah menjalankan ilmu untuk **perubahan**. Sebagai gerakan intelektual-akademis yang banyak menggunakan gagasan kiri, dalam benak para perintis Kajian Budaya agaknya senantiasa terngiang ungkapan Marx "*the poverty of philosophy*". Filsafat atau pemikiran apapun dianggap miskin kalau hanya berhenti untuk menjelaskan dan tidak untuk mengubah. Oleh karena itu, ketika di suatu masa Kajian Budaya di Inggris terhegemoni oleh teori hegemoni Althusser, Thompson mengkritik pedas akan bahaya *the poverty of theory*. Perubahan yang dimaksud tentu saja bukan sembarang perubahan melainkan perubahan ke masyarakat yang demokratis. Bukan demokrasi melainkan demokrasi yang benar-benar memberikan ruang partisipasi masyarakat untuk ikut mengatur kekuasaan. Jadi Kajian Budaya bukan sekedar *corpus of knowledge* atau disiplin ilmu yang perlu dikuasai, untuk diajarkan. Kajian Budaya hanya bisa dijalankan oleh orang-orang mau berubah dan mengubah situasi. Semangat perubahan dalam Kajian Budaya ini antara lain tampak pada kedekatan para praktisi Kajian Budaya dengan berbagai kelompok gerakan sosial-budaya. Hal itu pun juga tampak di Indonesia. Memang, semangat perubahan itulah yang membuat Kajian Budaya ada dan berkembang. Sebaliknya, Kajian Budaya yang hanya diperlakukan sebagai *corpus of knowledge* cepat membosankan dan akan mati suri.

2. Perubahan ini saya tekankan untuk melengkapi kegiatan lainnya yang selama ini sudah menjadi praktek yang lazim dalam Kajian Budaya, yaitu **pemaknaan**. Kalau Kajian Budaya hanya berhenti pada pemaknaan (lewat tafsir budaya) tanpa ditempatkan dalam horizon perubahan, praktek Kajian Budaya bisa terjebak dalam ritualisasi disipliner yang justru dihindari oleh Kajian Budaya.
3. Dari semangat perubahan itulah, para perintis Kajian Budaya mempelajari kembali berbagai disiplin ilmu yang selama ini menyenarai, tetapi tidak luput dari bias ideologi dominan. Sastra diteliti bukan hanya dari segi bentuk melainkan sebagai salah satu bentuk ideologi masyarakat penghasilnya. Demikian juga dalam lingkup Kajian Budaya orang menafsirkan ulang sejumlah teori yang karena satu dan lain hal dipinggirkan namun sesungguhnya bisa memberikan landasan yang solid pada pengembangan Kajian Budaya. Ambil contoh Norman K. Denzin yang meninjau ulang interaksionalisme simbolis dalam karyanya *Symbolic Interactionism and Cultural Studies. The Politic of Interpretation* (1992). Apa yang saya lakukan dalam *Semiotika Negativa* (2003) juga saya tempatkan dalam konteks Kajian Budaya. Dengan demikian, Kajian Budaya yang sangat dekat dengan perubahan tidak membuat Kajian Budaya menjadi pragmatis dan instan. Sebaliknya, Kajian Budaya justru merasa perlu kembali ke sumber-sumber (*founding texts*) ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan. Tidak kalah penting yang semestinya ditafsir ulang (paling tidak di Indonesia) adalah fenomenologi, dari mana konsep *lived experience* berasal. Maksud saya, Kajian Budaya sebaiknya mempunyai "ceritanya" sendiri tentang fenomenologi - suatu cerita yang barang kali berbeda dengan yang diberikan oleh filsafat atau disiplin-disiplin ilmu lainnya.

Kajian Budaya semacam itu pasti sangat *challenging* bagi ilmu-ilmu humaniora dengan berbagai insinuasinya.

4. Di sini saya merasa perlu berhenti sejenak begitu menyebut *ilmu-ilmu humaniora*. Nomenklatur ini tidak bisa kita perlakukan secara *taken for granted*. Menurut penelitian saya, istilah “ilmu-ilmu humaniora” sebenarnya agak rancu. Istilah “humaniora” dulu dipakai sebagai sebuah *studium generale* untuk membuat orang supaya lebih manusiawi (*humanior*). Ketika muncul disiplinisasi ilmu-ilmu, *studium generale* itu mati suri. Orang belajar sastra bukan untuk menjadi lebih manusiawi lewat sastra melainkan untuk mendapatkan ilmu sastra; orang belajar seni bukan untuk menjadi lebih manusiawi lewat seni melainkan supaya mendapatkan keterampilan dalam seni; orang belajar agama bukan untuk menjadi lebih manusiawi lewat agama melainkan supaya menguasai ilmu agama (semisal teologi atau apa saja namanya). Jadi, seperangkat pengetahuan yang dulu diajarkan untuk kepentingan humaniora (“memanusiawikan manusia”, kata Drijarkara) kemudian diajarkan untuk kepentingan keahlian dan ketrampilan. Tapi celaknya justru ilmu-ilmu semacam inilah yang diberi label (di Indonesia) *ilmu-ilmu humaniora*. Pengajaran sastra, seni, agama dalam konteks humaniora sangat berbeda dengan pengajaran sastra, seni, agama dalam konteks ilmu-ilmu humaniora. Kalau para perintis Kajian Budaya kemudian berpaling pada budaya pop (apa pun bentuknya), mereka melihat bahwa pada kenyataannya lewat budaya semacam itulah masyarakat mengalami pendidikan humaniora yang sebenarnya. Sebaliknya, orang mempelajari berbagai budaya adi luhung pada kenyataannya hanya untuk kepentingan pengetahuan dan keterampilan. Fenomena ini begitu kasap mata di lembaga-lembaga akademis di Indonesia.
5. Dilema (bahkan malah *contradictio in terminis*) dalam ungkapan ilmu-ilmu humaniora itu membuat saya

berpikir ulang setiap kali bicara “pengembangan ilmu-ilmu humaniora”. Kalau Kajian Budaya dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu-ilmu humaniora dalam bentuknya yang sudah mapan sampai sekarang, hal itu salah alamat. Sebaliknya, kalau Kajian Budaya dimaksudkan untuk menagih janji ilmu-ilmu *humaniora* yang hendak melakukan “humaniorisasi”, langkah ini bisa menusuk jantung identitas ilmu-ilmu humaniora. Saya berpikir bahwa dengan cara itulah Kajian Budaya seharusnya bisa mengembangkan ilmu-ilmu humaniora. Supaya pertemuan Kajian Budaya dan ilmu-ilmu humaniora bisa kreatif, ilmu-ilmu humaniora harus siap membuka tiga jendela yang bercorak: politis, tekstual, dan pasca disipliner. **Politis**, karena ilmu itu mau tidak mau ditempatkan dalam praktek kekuasaan. Tanpa bersifat politis, pengembangan ilmu-ilmu humaniora bisa memerosokkan kita secara tidak sadar. Jadi, harus ada analisa kekuasaan. Politik ekonomi harus menjadi pengetahuan umum bagi siapa saja yang hendak mengembangkan ilmu-ilmu humaniora. **Tekstual**, karena proses komunikasi sosial-budaya perlu dilihat sampai ke tingkat perseptif-estetis (bukan hanya ideal). Tidak ada cara lain untuk masuk ke wilayah itu kecuali dengan menggunakan kategori teks (termasuk teks budaya). **Pasca-disipliner**, karena kita tidak bisa lagi melihat ilmu secara fragmentaris. Akan tetapi -ini penting- tidak berarti kita bisa menghindar dari tanggung jawab kita untuk menguasai disiplin-disiplin ilmu. Tradisi keilmuan kita masih sangat muda. Pada hal ilmu itu historis, orang tidak bisa mengabaikan penguasaan ilmu-ilmu yang selama ini berkembang. Semakin kita bersentuhan dengan Kajian Budaya semakin kita ingin memeriksa ilmu-ilmu yang berkembang selama ini.

6. Setelah sekian lama bergumul dengan Kajian Budaya, saya melihat Kajian Budaya “malu-malu” memasuki paling

tidak dua wilayah, yaitu estetika dan etika. Hal ini bisa dipahami karena Kajian Budaya pada mulanya memang menggugat Estetika (dengan E besar). Akan tetapi, dalam kajian budaya pop (yang menjadi salah satu perhatian utama Kajian Budaya) kita tidak hanya berhenti pada analisis ideologi, sebaliknya juga harus sampai ke semacam struktur estetik dalam proses konsumsinya. Walaupun saya belum bisa melihat bagaimana mendekati masalah etika dalam Kajian Budaya, saya sudah melihat miskinnya penelitian Kajian Budaya kalau alergi dengan masalah etika. Karena bagaimanapun etika –khususnya wacana-wacana etis– merupakan salah satu wajah dari pengelolaan kekuasaan baik atas diri sendiri maupun orang lain.

7. Dua wilayah yang jarang disentuh itu membuat Kajian Budaya kehilangan daya antisipatif, karena hanya menafsirkan terus-menerus tanpa membiarkan diri kita dibuka pada suatu utopia atau *big ideas*. Bagi saya, utopia pertama-tama adalah soal estetika dan etika (*faculty of feeling* dan *faculty of desiring*, meminjam terminologi Kant). Apakah artinya pengembangan ilmu-ilmu humaniora tanpa dipandu oleh *big ideas*? Kajian Budaya bisa mendukung lahirnya *big ideas* sejauh tidak malu laku menyentuh masalah estetika dan etika. *Big ideas* ini sudah sering kita jumpai di kalangan para cendekiawan Indonesia di masa lalu semisal Bung Hatta dan Sudjatmoko. Namun, pada perjalanannya kita terputus dari tradisi itu karena satu dan lain hal. Sedangkan kita sekarang banyak mengerjakan hal-hal teknis kecil tanpa *big ideas*, atau utopia melainkan hanya dengan rumusan besar yang dibuat secara analitik saja.

DAFTAR PUSTAKA

Denzin, Norman K. 1992. *Symbolic Interactionism and Cultural Studies. The Politic of Interpretation*. Oxford UK: Blackwell

Sunardi, St. 2003. *Semiotika Negativa*. Yogyakarta: Kanal.

Sunardi, St. *Jurnal Retorik*, Oktober 2003, hlm. 5-42.

Sunardi, St. *Majalah Basis*, November-Desember 2002, hlm. 8-15.